

Tata Kelola MBG **Berbasis Sekolah dan Komunitas** Agar Kebijakan Fiskal Optimal



Alternatif solusi atas kelemahan tata kelola sentralisasi MBG dalam Perpres 115/2025

Tesis utama

MBG tidak cukup hanya cepat dan besar. Program ini harus bergizi, aman, tepat sasaran, akuntabel, dan menggerakkan ekonomi lokal. Itu lebih mungkin dicapai melalui sentralisasi standar, tetapi desentralisasi operasional berbasis sekolah/komunitas.

Pasal yang direspons

Pasal 19, 7-9, 13, 18, 20-21, 41-43, 54-58, 61-62 Perpres 115/2025

Kritik regulasi + keunggulan desentralisasi operasional sekolah/komunitas

https://bambangjuanda.com/wp-content/uploads/2026/04/Kritik-thd-Perpres-115-th-2025_MBG-1.pdf

Mengapa model sekolah/komunitas lebih unggul?

Model ini memperbaiki celah Perpres 115/2025 tanpa mengorbankan standar nasional dan percepatan layanan.

Masalah sentralisasi (yg berlaku sekarang)

Dapur besar dan rantai logistik panjang tampak efisien di atas kertas, tetapi rawan penurunan mutu, biaya distribusi tinggi, food waste, dan manfaat ekonomi yang tidak banyak berputar di lokal.

Celah regulasi

Perpres 115/2025 memberi ruang kewenangan besar kepada BGN dan mitra luas, sementara guardrail konflik kepentingan, biaya, kontrak, dan pengawasan sosial belum dikunci secara eksplisit.

Solusi tata kelola

Pusat menetapkan standar dan audit; daerah memverifikasi dan membina; sekolah/komunitas mengelola dapur kecil, pengadaan lokal, distribusi dekat, dan feedback harian.

Inti kebijakan: kecilkan risiko operasional, perpendek rantai pasok, perkuat akuntabilitas lokal, dan jaga standar nasional.

Pasal/ayat yang diperbaiki arahnya

Pasal 19(1), 19(3), 19(4), 19(6); Pasal 7(1)-(2), Pasal 9(1), Pasal 13, 18, 20(2), 21(1)-(2); Pasal 41(2)-(3), Pasal 43; Pasal 54-58; Pasal 61(1), 61(5), dan Pasal 62(6).

Kritiknya bukan anti-MBG, tetapi anti-tata kelola yang terlalu tersentralisasi

Tujuan baik membutuhkan desain kelembagaan yang membatasi penyalahgunaan kewenangan.

Argumen kolega Akademisi

"Aturannya sudah bagus; masalahnya hanya implementasi di lapangan."

Jawaban policy brief

Masalah implementasi memang ada, tetapi sebagian risiko sudah melekat dalam desain regulasi: kewenangan luas, detail teknis didelegasikan, penunjukan langsung dibuka, dan akuntabilitas sosial belum diwajibkan.

Konsekuensi bila tidak diperbaiki

MBG berisiko menjadi besar secara fiskal, tetapi lemah dalam *value for money*: sasaran tidak tepat, biaya sulit diuji, mutu makanan tidak konsisten, dan manfaat ekonomi lokal bocor keluar wilayah.

Arah solusi

Model sekolah/komunitas memindahkan sebagian kontrol operasional ke titik layanan: sekolah, komite, orang tua, desa, petani, UMKM, dan pemda. Pusat tetap mengunci standar dan audit.

Kalimat kunci: aturan yang baik bukan hanya memberi kewenangan, tetapi juga membatasi penyalahgunaan kewenangan.

Pasal/ayat Perpres 115/2025 yang direspons oleh model alternatif

Setiap keunggulan model sekolah/komunitas ditautkan langsung pada celah regulasi yang diperbaiki.

Pasal/ayat	Celah sentralisasi	Respons sekolah/komunitas
Pasal 19(1), 19(3), 19(4), 19(6)	Mitra luas; SPPG dan sarpras dapat menjadi ruang belanja besar	Seleksi mitra lokal berbasis kapasitas, beneficial ownership, konflik kepentingan, dan audit publik
Pasal 7(1)-(2), 9(1), 13, 18, 20(2), 21(1)-(2)	BGN dominan dalam perencanaan, kebutuhan, lokasi, dan aturan teknis	Pembagian peran: pusat-standar; daerah-verifikasi; sekolah/komunitas-delivery
Pasal 41(2)-(3), 43	Digitalisasi dan dukungan daerah rawan menjadi "kotak hitam" belanja	Dashboard akuntabilitas, standar biaya, data konsumsi, food waste, dan belanja sarpras terbuka
Pasal 54-58	Monev formal ada, tetapi akuntabilitas sosial belum menjadi inti	Sekolah, orang tua, komite, desa, petani, UMKM ikut menjadi pengawas formal
Pasal 61(1), 61(5), 62(6)	Penunjukan langsung dan mekanisme keuangan khusus membuka diskresi	Kontrak kinerja, alasan tertulis, nilai kontrak, penyedia, pemilik manfaat, dan audit independen

Sentralisasi standar + desentralisasi operasional

Bukan desentralisasi penuh; yang diusulkan adalah pembagian fungsi agar standar kuat dan *delivery* adaptif.

Pusat / BGN

Standar gizi, keamanan pangan, menu acuan, dashboard nasional, benchmark biaya, audit nasional, dan sanksi.



Pemerintah daerah

Verifikasi pelaksana, pembinaan kapasitas, supervisi mutu, integrasi data sosial-ekonomi, dan koordinasi pangan lokal.



Sekolah / komunitas

Dapur kecil, menu adaptif, pengadaan lokal, distribusi dekat, pencatatan konsumsi, komplain, dan food waste.

Feedback loop

Data harian dari sekolah/komunitas kembali ke pemda dan BGN: jumlah porsi, mutu, komplain, sisa makanan, harga bahan, dan pemasok lokal.

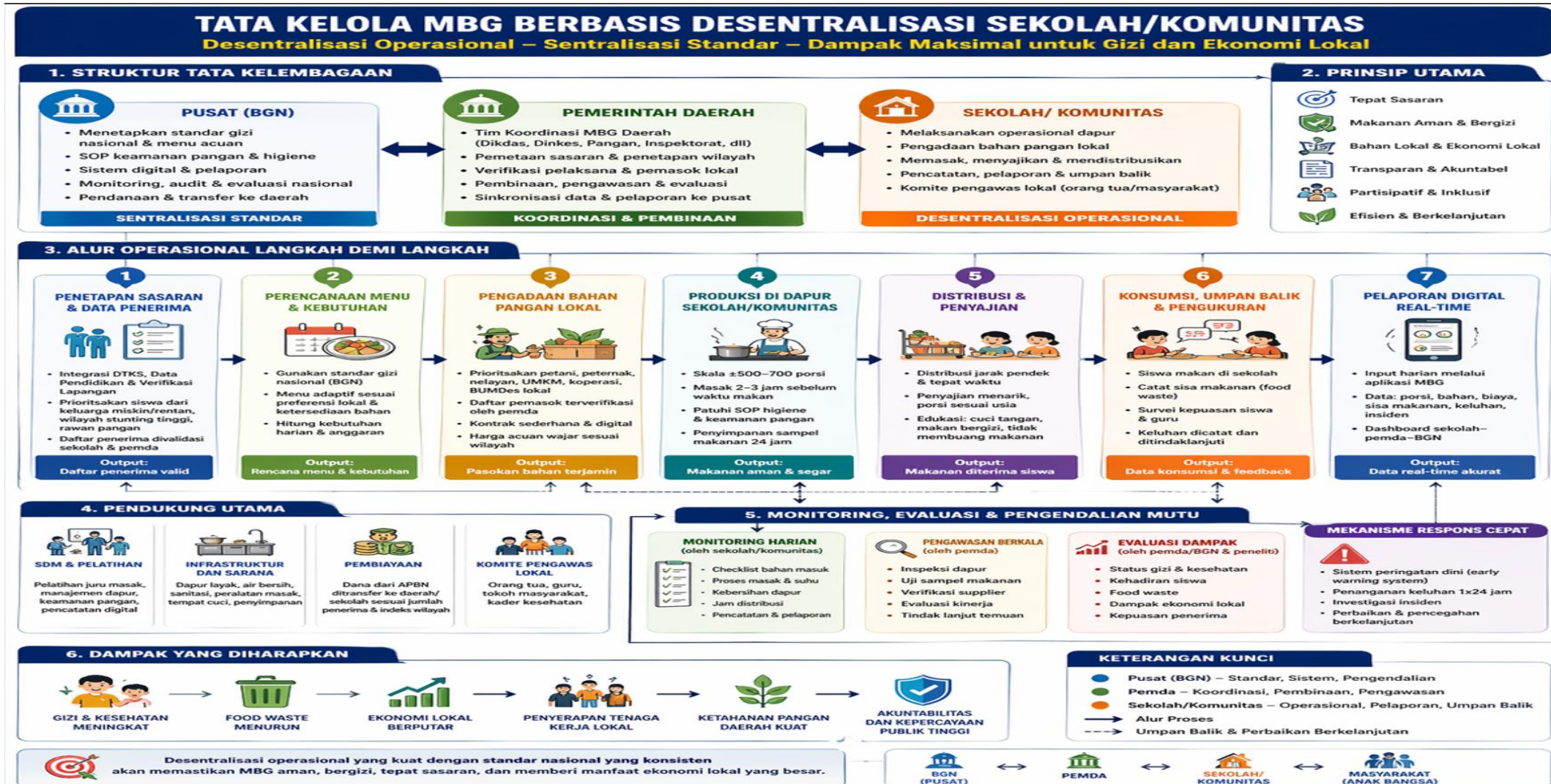
Koreksi atas Perpres

Menjawab Pasal 7-9 dan 13-21: kewenangan BGN tetap ada, tetapi tidak menjadi dominasi tunggal atas seluruh rantai keputusan.

Prinsip desain: pusat mengunci standar; lokal menjalankan layanan; publik mengawasi hasil.

Arsitektur tata kelola MBG berbasis sekolah/komunitas

Gambar merangkum struktur kelembagaan, alur operasional, pendukung utama, money, dan dampak yang diharapkan.



Mitra luas harus diubah menjadi mitra transparan dan berbasis kapasitas

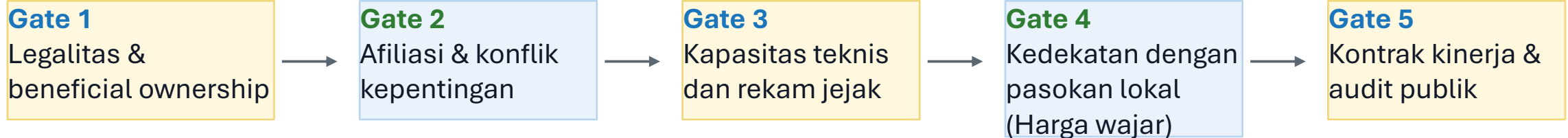
Pasal 19 membuka ruang kerja sama; model sekolah/komunitas menambahkan pagar konflik kepentingan.

Titik rawan dalam Perpres

Pasal 19(1) membuka kerja sama dengan yayasan/lembaga/ormas berbadan hukum. Pasal 19(3) memperluas kerja sama hingga pembangunan SPPG dan sarpras. Pasal 19(4) dan 19(6) menyerahkan kriteria/ketentuan lanjut ke BGN.

Perbaikan melalui model sekolah/komunitas

Mitra lokal tetap dibuka, tetapi wajib melewati seleksi terbuka, pembukaan *beneficial ownership*, deklarasi afiliasi politik/aparat/pejabat, rekam jejak layanan, kapasitas dapur, dan kontrak kinerja.



Kesimpulan: bukan anti-yayasan/ormas, tetapi anti-mitra berbasis akses tanpa transparansi.

Dari diskresi kebutuhan-anggaran menuju standar biaya dan pembagian peran

Pasal-pasal ini sah secara hukum, tetapi perlu *guardrail* agar tidak menjadi over-budgeting.

Titik rawan

Pasal 7(1)-(2) menempatkan Kepala BGN sebagai aktor perencanaan, termasuk sasaran, kebutuhan bahan baku, anggaran, data, rantai pasok, dan logistik. Pasal 9(1) mengatur perhitungan kebutuhan dan anggaran, tetapi belum mengunci struktur biaya rinci yang terbuka.

Over-delegation

Pasal 13, 18, 20(2), dan 21(1)-(2) membuat banyak detail perencanaan, KPPG/SPPG, kerja sama tahun jamak, dan prioritas lokasi kembali ditentukan oleh BGN.

Solusi biaya terbuka

Tetapkan unit cost terbuka: bahan pangan, tenaga kerja, distribusi, overhead dapur, logistik, sarpras, dan digitalisasi. Bandingkan harga antardaerah dan umumkan deviasi harga.

Solusi pembagian peran

BGN mengunci standar; pemda memverifikasi kebutuhan dan harga lokal; sekolah/komunitas mencatat realisasi porsi, sisa makanan, dan umpan balik penerima.

Solusi data

Dashboard memperlihatkan jumlah porsi, pemasok, harga bahan, food waste, keluhan, kualitas, dan hasil inspeksi per sekolah/komunitas.

Percepatan boleh, tetapi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas pengadaan

Penunjukan langsung dan mekanisme keuangan khusus harus disertai transparansi ekstrem.

Titik rawan pengadaan

Pasal 61(1) memungkinkan Kepala BGN menetapkan paket pengadaan melalui penunjukan langsung. Pasal 61(5) memberi ruang penyesuaian tahapan untuk mengatasi stagnasi. Pasal 62(6) membuka mekanisme khusus pengelolaan keuangan.

Perbaiki desain

Model sekolah/komunitas mendorong pengadaan lebih dekat ke sumber lokal, tetapi bukan tanpa aturan. Setiap kontrak harus punya alasan tertulis, nilai, penyedia, pemilik manfaat, lokasi, kualitas, dan hasil audit.

Aturan emas: semakin cepat skema pengadaan, semakin tinggi kewajiban transparansi.

Guardrail minimal

- daftar kontrak dan penyedia publik
- alasan penunjukan langsung
- harga satuan dan volume
- beneficial ownership
- inspeksi mutu dan audit acak
- kanal pengaduan sekolah/orang tua

Digitalisasi dan dukungan daerah harus menjadi alat akuntabilitas, bukan kotak hitam anggaran

Teknologi dan APBD pendukung perlu diarahkan untuk transparansi dan pengendalian mutu.

Pasal 41(2)-(3)

BGN melakukan percepatan digitalisasi: sistem informasi, standarisasi data, proses bisnis, manajemen internal, dan tugas strategis data/sistem informasi.

Pasal 43

Pemda dapat menyediakan lahan, sarpras SPPG, alat dapur, listrik, air, kendaraan distribusi, sanitasi, akses jalan, dan dukungan lain.

Risiko

Tanpa standar spesifikasi, teknologi dan sarpras bisa menjadi belanja mahal yang sulit diuji kewajarannya.

Dashboard sekolah/komunitas

Data yang harus muncul: jumlah penerima, porsi tersaji, menu, harga bahan, pemasok, sisa makanan, komplain, inspeksi higiene, dan rating penerimaan.

Standar dukungan daerah

Dukungan APBD harus berbasis kebutuhan riil, bukan duplikasi belanja. Prioritas: koordinasi, verifikasi, sanitasi, inspeksi mutu, dan kapasitas lokal.

Digitalisasi yang benar membuat biaya dan kualitas terlihat; bukan sekadar membeli perangkat.

Dari monev administratif ke akuntabilitas sosial

Pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlu menjangkau titik layanan.

Monev formal

Pasal 54-58 telah mengatur pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Namun pelaporan masih sangat berorientasi pada jalur kelembagaan formal.

Kelemahan yang diperbaiki

Program makan bergizi bersentuhan langsung dengan anak, sekolah, dan keluarga. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dari atas; harus ada kontrol sosial dari penerima layanan.

Sekolah

verifikasi porsi & mutu

Orang tua

komplain & penerimaan

Komite

pengawasan sosial

Desa

data rentan & pangan lokal

Petani/UMKM

pasokan & harga lokal

Akuntabilitas sosial mengubah penerima manfaat dari objek program menjadi pengawas layanan.

Dapur lebih kecil, distribusi lebih dekat, mutu lebih mudah dikontrol

Model sekolah/komunitas memperbaiki masalah kualitas yang sering muncul dalam produksi massal.

Sentralisasi SPPG besar

Kapasitas sangat besar mendorong produksi massal, waktu masak lebih jauh dari waktu konsumsi, distribusi lebih panjang, dan risiko mutu sulit dilacak sampai titik konsumsi.

Indikator mutu harian

- suhu dan waktu distribusi
- keluhan siswa/orang tua
- sisa makanan
- inspeksi kebersihan
- variasi menu
- kecukupan porsi
- pemasok bahan pangan

Model sekolah/komunitas

Dapur kecil 500-700 porsi lebih dekat ke penerima, menu lebih adaptif, makanan dapat disiapkan mendekati waktu konsumsi, dan pengawasan harian lebih realistis.

Pasal yang diperkuat

Menguatkan tujuan Pasal 4 dan kerangka monev Pasal 54-58 dengan data mutu harian dari titik layanan, bukan hanya laporan agregat.

Bukan sekadar skala produksi, tetapi kualitas layanan dan nilai guna fiskal.

Dari anggaran besar ke value for money

Model lokal membantu penajaman sasaran, pembacaan kebutuhan, dan kontrol biaya.

Masalah universal-seragam

Pendekatan terlalu seragam berisiko membuat belanja besar tidak sebanding dengan dampak gizi. Daerah dan kelompok yang paling membutuhkan dapat kalah oleh **logika cakupan cepat**.

Keunggulan lokal

Sekolah dan pemda memiliki informasi kontekstual tentang siswa rentan, kondisi sosial-ekonomi keluarga, preferensi makanan, dan pasokan pangan setempat.

Perbaikan pasal

Mengoreksi ruang perencanaan Pasal 7(1)-(2) dan Pasal 9(1) agar kebutuhan dan anggaran tidak hanya dihitung dari atas, tetapi juga diverifikasi dari bawah.

Prinsip fiskal: setiap rupiah harus sampai ke anak yang tepat, makanan yang layak, dan ekonomi lokal yang hidup.

Instrumen yang perlu dikunci

Data siswa dan keluarga; data kerentanan gizi; harga pangan lokal; indeks kemahalan wilayah; bukti konsumsi; food waste; dan evaluasi dampak periodik.

Mengapa tata kelola menentukan optimalisasi fiskal MBG

MBG beranggaran sangat besar. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan hanya serapan, tetapi *value for money*.

Tekanan ruang fiskal

Alokasi ratusan triliun dapat menekan defisit, utang, dan ruang belanja prioritas lain bila tidak terkendali.

Value for money

Setiap rupiah harus berubah menjadi gizi, kualitas layanan, dan dampak ekonomi lokal—bukan overhead berlebih.

Pasal yang dikunci

Pasal 7(1)-(2), 9(1), 61(1), 61(5), dan 62(6) perlu dibaca sebagai isu fiskal, bukan hanya teknis pelaksanaan.

Prinsip fiskal: belanja besar hanya sah secara kebijakan bila dampaknya terukur, tepat sasaran, dan efisien.

Pertanyaan kunci

Berapa biaya per porsi yang benar-benar dimakan? Berapa yang menjadi logistik, sarpras, digitalisasi, dan sisa makanan?

Di mana rupiah MBG bisa tidak berubah menjadi manfaat gizi?

Sentralisasi operasional dapat tampak efisien, tetapi berisiko menciptakan biaya tersembunyi dan belanja bernilai rendah.

Rantai logistik panjang

Biaya distribusi, waktu tempuh, dan risiko mutu meningkat bila dapur jauh dari titik konsumsi.

Overhead & mark-up

Ruang belanja SPPG, sarpras, digitalisasi, dan penunjukan langsung perlu standar harga dan audit terbuka.

Salah sasaran

Pendekatan terlalu agregat membuat kelompok paling membutuhkan berisiko tidak menjadi prioritas fiskal.

Food waste = kebocoran fiskal: makanan yang tidak dimakan berarti anggaran tidak berubah menjadi gizi.

Pasal terkait

Pasal 19(3)-(6), 41(2)-(3), 43, 61(1), 61(5), dan 62(6) harus diberi pagar biaya dan transparansi.

Mengapa sekolah/komunitas membuat kebijakan fiskal lebih optimal?

Model lokal bukan sekadar perubahan dapur, tetapi perubahan mekanisme agar biaya, mutu, dan dampak dapat dilacak.

Targeting lebih tajam

Sekolah dan pemda membaca kondisi siswa, keluarga, lokasi, dan kerentanan pangan secara lebih kontekstual.

Unit cost lebih terbuka

Harga bahan, tenaga kerja, distribusi, overhead, dan sisa makanan bisa dicatat per sekolah/komunitas.

Belanja berputar lokal

Local sourcing menahan sebagian belanja di petani, UMKM, koperasi, BUMDes, dan pasar lokal.

Rantai pendek menurunkan biaya transaksi dan memperbesar peluang makanan sampai dalam kondisi baik.

Perbaiki pasal

Memperkuat Pasal 7-9, 19, 43, dan 54-58: perencanaan, kerja sama, dukungan daerah, dan monev berbasis data lapangan.

Indikator minimum agar setiap rupiah bisa diuji publik

Kebijakan fiskal optimal membutuhkan indikator yang menghubungkan anggaran, output, kualitas, dan outcome.

Biaya per porsi

Bedakan porsi diproduksi, porsi tersaji, dan porsi benar-benar dimakan oleh penerima manfaat.

Rasio pangan vs overhead

Pisahkan belanja bahan pangan dari logistik, sarpras, digitalisasi, manajemen, dan biaya lain.

Harga & penyedia

Pantau deviasi harga bahan, kontrak, penyedia, pemilik manfaat, dan alasan penunjukan langsung.

Indikator kunci: cost per eaten meal, food waste rate, local sourcing share, complaint resolution, dan hasil inspeksi mutu.

Pasal terkait

Pasal 41(2)-(3) dan 54-58 harus diarahkan menjadi sistem data value for money, bukan laporan administratif semata.

Belanja besar harus bersyarat kinerja, transparansi, dan evaluasi dampak

MBG dapat menjadi investasi SDM, tetapi hanya jika tata kelolanya mengubah anggaran menjadi dampak yang terukur.

Targeted phasing

Perluasan cakupan dilakukan bertahap berdasarkan kesiapan kapasitas, data sasaran, dan hasil evaluasi pilot.

Batas biaya wajar

Tetapkan ceiling overhead, logistik, sarpras, digitalisasi, dan deviasi harga bahan pangan per wilayah.

Outcome-based expansion

Ekspansi wilayah dikaitkan dengan mutu, keamanan pangan, food waste rendah, dan serapan belanja lokal.

Aturan emas: perluasan anggaran mengikuti bukti kinerja, bukan sekadar target serapan atau jumlah dapur.

Pasal yang diperkuat

Pasal 7-9, 54-58, 61-62 perlu dilengkapi kontrak kinerja, audit independen, dan review periodik.

MBG harus menjadi belanja gizi sekaligus penggerak ekonomi wilayah

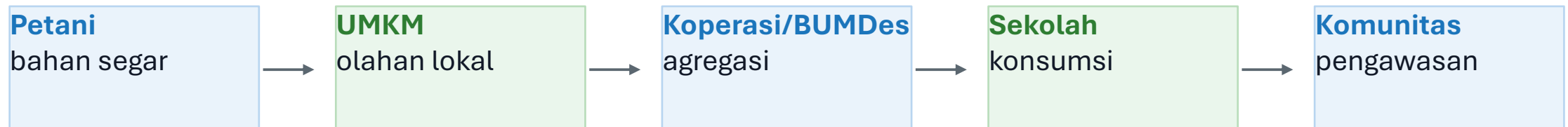
Model sekolah/komunitas memperbesar peluang belanja berputar di petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes.

Risiko sentralisasi

Pengadaan besar dapat memusatkan manfaat pada vendor tertentu. Rantai pasok panjang membuat nilai tambah lokal berkurang dan biaya distribusi meningkat.

Local sourcing

Pengadaan lokal melibatkan petani, UMKM pangan, koperasi, BUMDes, dan pelaku pasar lokal. Ini menahan uang program agar berputar di wilayah.



Perbaiki pasal

Menjawab Pasal 19 dan Pasal 43: kerja sama dan dukungan daerah diarahkan pada ekonomi lokal, bukan sekadar pembangunan sarpras dan kontrak besar.

Food waste sebagai indikator kegagalan desain, bukan sekadar selera anak

Model lokal lebih mudah menyesuaikan menu dan mengurangi pemborosan.

Mengapa *food waste* penting?

Sisa makanan berarti anggaran tidak berubah menjadi gizi. Ia juga menunjukkan menu tidak diterima, distribusi terlambat, porsi tidak sesuai, atau kualitas menurun.

Keunggulan model lokal

Sekolah/komunitas dapat membaca preferensi makan, menyesuaikan menu, mencatat sisa makanan harian, dan memperbaiki menu minggu berikutnya.

Data minimum

- porsi tersaji
- porsi dimakan
- sisa makanan
- jenis menu paling ditolak
- alasan penolakan
- waktu distribusi
- catatan komplain

Perbaiki pasal

Memperkuat Pasal 54-58: monev tidak hanya laporan pelaksanaan, tetapi *learning system* yang mengoreksi menu, logistik, biaya, dan kualitas.

Sentralisasi operasional vs sekolah/komunitas

Model alternatif lebih unggul bukan karena "lokal selalu lebih baik", tetapi karena risiko dan informasi dikelola lebih dekat ke masalah.

Aspek	Sentralisasi operasional	Sekolah/komunitas
Mutu makanan	Rantai panjang; waktu konsumsi lebih jauh	Produksi dekat; koreksi mutu lebih cepat
Targeting	Cenderung agregat dan top-down	Verifikasi sekolah, pemda, dan data sosial lokal
Biaya	Sulit menguji overhead dan logistik	Unit cost lokal bisa dibandingkan dan diaudit
Mitra	Berpotensi aktor berbasis akses	Mitra berbasis kapasitas dan kedekatan komunitas
Akuntabilitas	Laporan formal dari atas	Orang tua, sekolah, komite, desa ikut mengawasi
Ekonomi lokal	Manfaat mudah terkonsentrasi	Pasokan lokal menguatkan multiplier wilayah

Lima perbaikan aturan turunan agar model alternatif bisa dijalankan

Tidak semua harus menunggu revisi Perpres; sebagian dapat dimulai melalui Peraturan BGN, pedoman teknis, dan standar audit.

1. Klausul konflik kepentingan

Wajib BO, afiliasi, hubungan keluarga/bisnis, dan deklarasi integritas mitra.

3. Seleksi mitra terbuka

Kriteria kapasitas, rekam jejak, harga wajar, lokasi, dan kontrak kinerja.

5. Audit dan pengawasan sosial

Audit acak, kanal pengaduan, komite sekolah/orang tua/desa sebagai pengawas formal.

2. Standar biaya rinci

Publikasi unit cost bahan pangan, dapur, tenaga kerja, logistik, digitalisasi, sarpras.

4. Dashboard akuntabilitas

Data sekolah: porsi, menu, harga, pemasok, sisa makanan, komplain, inspeksi.

Fokus: mengunci pagar akuntabilitas sebelum skala program makin besar.

Dari pilot ke skala nasional yang akuntabel

Model sekolah/komunitas perlu diuji bertahap agar standar nasional dan kapasitas lokal tumbuh bersama.

0-3 bulan

Pilot terbatas
Pilih kab/kota dengan kesiapan sekolah, pemda, pemasok lokal, dan data penerima.



3-6 bulan

Standarisasi biaya
Kunci unit cost, menu, SOP higiene, mekanisme konflik kepentingan, dan format dashboard.



6-12 bulan

Ekspansi bertahap
Perluas ke wilayah beragam; bandingkan biaya, mutu, food waste, dan dampak lokal.



12 bulan+

Institutionalization
Masukkan akuntabilitas sosial, audit publik, dan local sourcing sebagai bagian aturan turunan.

Indikator keberhasilan

Mutu makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, biaya per porsi, porsi dimakan, food waste, keluhan terselesaikan, proporsi belanja lokal, dan kepatuhan konflik kepentingan.

Penutup

**MBG harus diperkuat dari hulunya:
regulasi, desain kelembagaan, dan akuntabilitas sosial.**

Kesimpulan

Perpres 115/2025 memberi dasar percepatan MBG. Namun percepatan tanpa pagar akuntabilitas dapat memperbesar risiko rente, mark-up, dan belanja bernilai rendah. Model sekolah/komunitas menawarkan jalan tengah: standar tetap nasional, operasional dekat penerima manfaat, pengawasan dibuka kepada masyarakat, dan belanja pangan lebih banyak berputar di ekonomi lokal.

Gizi

menu sesuai standar dan diterima anak

Fiskal

unit cost terbuka dan bisa diaudit

Governance

mitra transparan dan bebas konflik

Lokal

petani/UMKM ikut bergerak

Bukti empiris Susenas: manfaat MBG terkonsentrasi secara spasial



58.9%
manfaat MBG berada di
Pulau Jawa

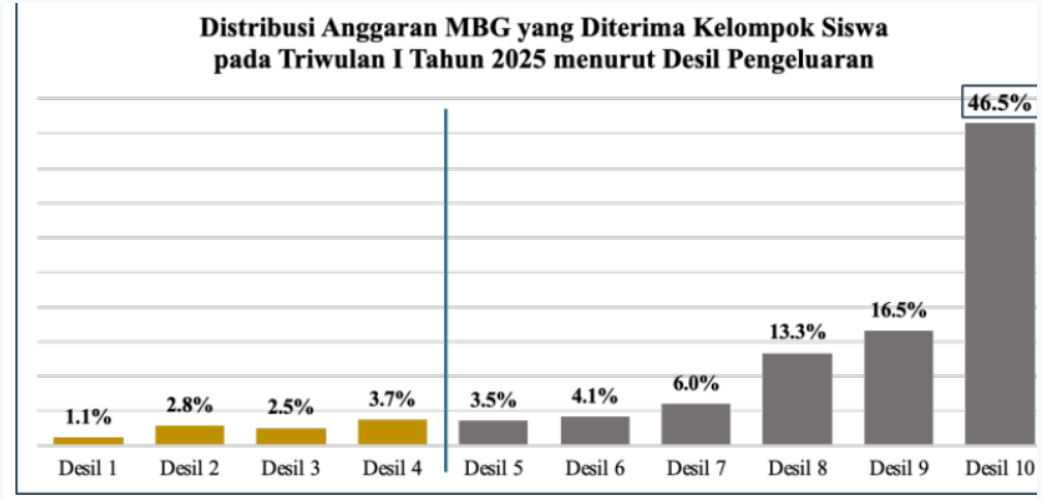
80.4%
manfaat diterima wilayah
perkotaan

19.6%
manfaat diterima wilayah
perdesaan

Prinsip
distribusi ideal mengikuti
kebutuhan, bukan hanya
kepadatan populasi

Implikasi fiskal: tanpa afirmasi wilayah rawan gizi, anggaran besar dapat memperkuat ketimpangan antardaerah.

Bukti empiris Susenas: distribusi manfaat belum progresif



10.2%
manfaat diterima
kelompok bawah (desil 1-4)

62.9%
manfaat diterima
kelompok atas (desil 9-10)

1.1%
manfaat desil termiskin

46.5%
manfaat desil terkaya

Paradoks: empat desil terbawah memiliki konsumsi protein paling rendah (51.4 gram/kapita/hari)

Daftar Pustaka

- BGN-Bappenas. (2025). *Pengembangan Mekanisme Pemantauan Kebijakan MBG dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. (Laporan penelitian)
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson.
- Detiknews. (2026, April 17). 8 Poin Temuan KPK Saat Kaji Tata Kelola MBG, Minta Ada Perbaikan. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-8448938/8-poin-temuan-kpk-saat-kaji-tata-kelola-mbg-minta-ada-perbaikan>
- Food And Organization. (2019). *School Food and Nutrition Framework*. FAO
- FISIP UI. (2026). Penelitian antropologi FISIP UI temukan risiko food waste dalam implementasi program makan bergizi gratis (MBG). <https://fisip.ui.ac.id/penelitian-antropologi-fisip-ui-temukan-risiko-food-waste-dalam-implementasi-program-mbg/>
- Juanda, B. (2024, December 10). Optimalisasi Program Makanan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah dan Ibu Hamil. *Republika*. <https://www.republika.id/posts/55910/optimalisasi-program-makanan-bergizi-gratis-untuk-anak-sekolah-dan-ibu-hamil>
- Juanda, B. (2025a, December 12). Dampak Ekonomi Program MBG dan Keterkaitannya dengan Dinamika Ekonomi Lokal sebagai Pengungkit Pertumbuhan. Dalam *FGD Mekanisme Pemantauan Kebijakan MBG untuk Pertumbuhan Daerah*. BGN-Bappenas.
- Juanda, B. (2025b, October 17). Statistik Kecil, Risiko Besar: Mengawal Amanah MBG dengan Jujur dan Dewasa. *Republika*. <https://www.republika.id/posts/59249/statistik-kecil-risiko-besar-mengawal-amanah-mbg-dengan-jujur-dan-dewasa>
- Juanda, B. (2025c, April 15). Membedah Dampak Program MBG. *Republika*. <https://www.republika.id/posts/57508/membedah-dampak-program-mbg>
- Juanda, B. (2026). Desain Kelembagaan Program MBG: Antara Sentralisasi Operasional dan Desentralisasi Berbasis Dampak Lokal. Dalam *Orange Book FEM 2026 "Transformasi Ekonomi Berkelanjutan: Memperkuat Resiliensi Domestik di Tengah Ketidakpastian Global melalui Ketahanan Pangan, Hilirisasi, dan Inovasi Energi Terbarukan"*. FEM-IPB.
- Juanda, B. (2026, April 9). Sentralisasi atau Desentralisasi MBG, Mana yang Lebih Ampuh Gerakkan Ekonomi Lokal? *Republika*. <https://www.republika.id/posts/60018/sentralisasi-atau-desentralisasi-mbg-mana-yang-lebih-ampuh-gerakkan-ekonomi-lokal>
- Juanda, B., & Handra, H. (2017). *Reformasi mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia* (Working Paper, KOMPAK). https://bambangjuanda.com/wp-content/uploads/2019/09/171006_Working_Paper_DAK_Final.pdf
- Juanda, B., Halim, A., Azis, N., & Kaiwai, H.Z. (2013). *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas belanja Daerah* (Laporan TADF). https://sipakaril.ipb.ac.id/Files/3c7b9111-8827-4290-ac9d-8030aef27499/paper_3c7b9111-8827-4290-ac9d-8030aef27499.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan dan upaya penanggulangannya di Indonesia*. Kemenkes RI.
- Natih, P. G. L. (2025). *Tracking impact: Leveraging pre-existing monitoring tools for assessing Indonesia's free nutritious meal (Makan Bergizi Gratis) programme*. *Economics and Finance in Indonesia*, 71(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/efi/vol71/iss2/3/>
- Novianto, A., Zega, S. E. N., Airlangga, S. A., & Atmojo, D. P. (2026). *Siapa yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis? Persepsi publik, krisis kepercayaan, dan persoalan tata kelola MBG* (Laporan Riset Porec 01/2026). Policy Research Center (Porec)
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Evaluasi dampak MBG perlu menggunakan pendekatan yang lebih kuat secara metodologis, seperti quasi-experiment atau *randomized controlled trial* (RCT), serta memanfaatkan instrumen seperti *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) dalam Susenas (Natih, 2025).

Secara ringkas, delapan item FIES menanyakan apakah karena kekurangan uang atau sumber daya lain, responden pernah:

1. khawatir tidak punya cukup makanan,
2. tidak bisa makan makanan sehat/bergizi,
3. hanya makan sedikit jenis makanan,
4. terpaksa melewatkan makan,
5. makan lebih sedikit dari yang dibutuhkan,
6. kehabisan makanan,
7. merasa lapar tetapi tidak makan,
8. tidak makan seharian. Inti logikanya: semakin banyak jawaban “ya”, terutama pada item-item yang lebih berat, semakin tinggi tingkat kerawanan pangan. (FAOHome)

Bias pendekatan Regresi dgn Dummy (MBG) dan Food Village Readiness Index:

$$Y = \beta_0 + \beta_1(\text{MBG}) + \beta_2(\text{FVRI}) + \beta_3(\text{MBG} \times \text{FVRI}) + \varepsilon$$